

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (AIPT)  
DALAM MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI NEGERI  
DI INDONESIA**



**Disusun Oleh:**

Nama Lengkap	Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
NIP	196805151997032004
NIDN	20 150568 03
ID Litapdimas	20201611110330
Jabatan	Lektor Kepala (IV/c)
Prodi	Manajemen Pendidikan
Posisi Dalam Penelitian	Ketua Peneliti

Nama Lengkap	Irsal, S.Sos.I.,M.Ag
NIP	-
NIDN	8949670023
ID Litapdimas	20201619130404
Jabatan	Asisten Ahli (III/b)
Prodi	Filsafat Agama
Posisi Dalam Penelitian	Anggota Peneliti

Nama Lengkap	Elvida Sari Yunilarosi, M.Pd
NIP	-
NIDN	20 290691 03
ID Litapdimas	20201616140922
Jabatan	Asisten Ahli (III/b)
Prodi	Pendidikan IPA
Posisi Dalam Penelitian	Anggota Peneliti

**PROGRAM KEGIATAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mutu perguruan tinggi merupakan kajian yang sangat strategis dan penting untuk dikaji, karena mutu Perguruan Tinggi (PT) merupakan standar dan menjadi penentu dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Sebagaimana Khairiah, K. dkk. (2022) menjelaskan bahwa dalam lingkungan PT dianggap bermutu ketika PT tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sanggup memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kehidupan, mampu melahirkan orang-orang yang dibutuhkan dunia kerja, lebih-lebih mampu melahirkan sosok yang produktif membuka lapangan pekerjaan, serta mampu melahirkan orang-orang yang professional dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Mutu PT dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu; (1) mutu yang sesungguhnya sebagai hasil proses pembelajaran sesuai dengan klasifikasi tujuan pendidikan dan kompetensi dasar yang dimiliki para lulusan; dan (2) mutu lulusan yang diukur dengan kepuasan pelanggan dan bertambahnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan.<sup>2</sup> Mutu bagi PT merupakan hasil perpaduan usaha dari semua komponen dan dijadikan sebagai salah satu alat ukur keberhasilan produsen, dengan melihat tingkat kepuasan customers dan stakeholders, baik internal maupun eksternal.<sup>3</sup>

Mutu PT merupakan proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu juga didasar akal sehat. Mutu menciptakan lingkungan pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil-wakil masyarakat dan pemuka bisnis untuk bekerjasama guna memberikan para sumberdaya yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan masyarakat.<sup>4</sup> Bagi setiap PT mutu merupakan agenda utama dan tugas yang paling penting,

---

<sup>1</sup>Khairiah, K., Mubaraq, Z., Asmendri, A., Hendriani, S., Musa, D. T., & Sihombing, A. A. (2022). Delegitimization of Leadership in Overcoming Difficulties in Online Learning during the COVID-19 Pandemic. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 14(3), 726-739. <https://doi.org/10.18844/wjet.v14i3.7209>

<sup>2</sup>Umam, M. K. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik. *Jurnal Al-Hikmah*, 6(2), 62-76.

<sup>3</sup>Khairiah, K., & Sirajuddin, S. (2019). The effects of university leadership management: efforts to improve the education quality of state institute for Islamic studies (IAIN) of Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 239-266. <https://doi.org/10.14421/jpi.2018.72.239-266>

<sup>4</sup>Khairiah, K., Mubaraq, Z., Mareta, M., Musa, D. T., Naimah, N., & Sulistyorini. (2023). Discrimination in Online Learning During the COVID-19 Pandemic in Indonesian Higher Education. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), e710. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.710>

meskipun ada sebagian orang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka teki. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh ketika ada dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang seragam tentang metode menciptakan PT yang efektif.<sup>5</sup> Oleh karena itu, meningkatkan mutu PT bukanlah perkara yang mudah, membutuhkan perencanaan yang matang, komitmen dan keinginan yang kuat, kemudian diterjemahkan dalam visi, misi, dan tujuan PT tersebut. Dengan demikian PT dapat disebut bermutu dan efektif, jika mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, laku di dunia kerja, bisa menciptakan lapangan kerja.

Namun, saat ini masalah krusial yang dihadapi PT adalah mempercepat terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu, peningkatan mutu pelayanan pendidikan menjadi suatu hal yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda seperti pemerataan mutu pendidikan dalam PT yang merupakan salah satu agenda bangsa Indonesia yang menginginkan mutu SDM tinggi.<sup>6</sup> Masalah yang lain yang dihadapi PT masih rendahnya pemerataan dalam memperoleh layanan pendidikan, masih rendahnya mutu seperti masih terdapat PT yang belum terakreditasi, dan belum muncul pada peringkat *webometrics*,<sup>7</sup> dan belum relevansi pendidikan dan masih lemahnya manajemen pendidikan pada PT.<sup>8</sup> Masih banyak PT kesulitan mengikuti perkembangan arus kompetisi global, sehingga instrumentasi pendidikan pada PT masih jauh dari yang diharapkan, dan banyak PT khususnya PTS yang mengalami nasib yang tragis atau mengenaskan bahkan gulung tikar.<sup>9</sup> Realitas tersebut membawa dampak yang luar biasa terhadap munculnya image kesenjangan mutu antara PTN dan PTS yang pada akhirnya memunculkan pandangan dikotomis bahwa PTN merupakan PT yang memiliki mutu yang lebih baik dari PTS. Kondisi ini juga membuat masyarakat lebih percaya dan cenderung memilih PTN umum dibandingkan

---

<sup>5</sup>H Abuddin Nata, M. A. (2012). *Pengaturan Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.

<sup>6</sup>Razak, Y., Syah, D., & Aziz, A. (2016). Kepemimpinan, kinerja dosen dalam peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi. *Tanzhim*, 1(02), 30-44.

<sup>7</sup><https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia%20?page=1&sort=asc&order=University> / <https://e-smisdiktis.kemenag.go.id/akreditasi-institusi>

<sup>8</sup>Khairiah, K. (2015). Pengaruh Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan PTAIN. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 8(2).

<sup>9</sup>Prasetyo, M. A. M., & Husaini, H. (2021). Efektivitas Pengelolaan Mutu Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. *Improvement: Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 8(1), 29-39.

PTIN (UIN), apalagi jika dibandingkan dengan PT internasional, baik di dalam maupun luar negeri seiring arus liberalisasi pendidikan dunia. Internasionalisasi PT ke depan bukanlah suatu ironi, tetapi realitas kekinian yang sudah semakin mengarahkan probability itu menjadi kenyataan.<sup>10</sup> Masih banyak problematika PTIN khususnya pendanaan, sehingga PTIN belum mampu menjadi kekuatan aktual bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Tersendatnya perkembangan PTIN karena minimnya alokasi dana yang disediakan pemerintah, kehadiran teknologi dan informasi juga merupakan fenomena yang tidak bisa ditolak, sehingga pembaharuan PT yang dilakukan selalu terbentur pada persoalan dana.<sup>11</sup>

Studi ini berupaya melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung membahas tiga hal tentang evaluatif, hambatan dan dampak mutu PT; *Pertama*, studi evaluasi yang membandingkan mutu PT yang menggunakan SAPTO dengan mutu sebelum menggunakan SAPTO seperti tidak mampu mencapai akreditasi unggul dan tidak mampu memperbaiki reting *webometrics*<sup>12</sup>, *Kedua*, studi memotret dampak mutu PT, baik dampak bagi lembaga PT maupun dampak bagi mutu lulusan seperti masyarakat kurang percaya kepada manajemen PT, kurang minat masuk ke PT, dan lulusan PT tidak mampu berkompetitif,<sup>13</sup> *Ketiga*, studi yang melihat hambatan dalam mencapai mutu PT yang efektif seperti tingkat kesiapan lembaga, kesiapan sumberdaya manusia dan tingkat kesiapan perangkat teknologi.<sup>14</sup> Dari ketiga kecenderungan tersebut belum ada studi yang mengkaji efektifitas pengelolaan AIPT dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi, dan belum menjawab masalah mutu dilingkungan Perguruan Tinggi Negeri.

---

<sup>10</sup>Wajdi, M. B. N. (2016). Metamorfosa Perguruan Tinggi Agama Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 4(1), 92-109. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2227>

<sup>11</sup>Daud, Y. M. (2022). Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia. *Intelektualita*, 10(02).

<sup>12</sup>Khairiah, K., & Sirajuddin, S. (2019). The Effects of University Leadership Management: Efforts to Improve the Education Quality of State Institute for Islamic Studies (IAIN) of Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 239–266. <https://doi.org/10.14421/jpi.2018.72.239-266>

<sup>13</sup>Marselinus Heriteluna, (2017), *Akreditasi Perguruan Tinggi dan Budaya Bukti (Culture of Evidence)*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya. Jurnal SEPAKAT Vol.4 No.1, Desember 2017. Baca Juga: Qausya Faviandhani dan Dwi Ayus Lusya, (2018), *Analisis Sentiment Mahasiswa Manajemen Tahun Pertama Terhadap Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Swasta*. Universitas Narotama Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen Magistra Vol.2.No.2 September 2018.

<sup>14</sup>Wijiharjono, N. (2021). Akreditasi Perguruan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Sebuah Pengalaman dan Harapan.

Studi ini bertujuan merespon atas kecenderungan studi yang ada, dengan mengkaji tentang efektifitas pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi di Indonesia, hanya pada tataran mutu perguruan tinggi dengan menganalisis bagaimana efektifitas pengelolaan AIPT telah menstrukturkan kesulitan dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, tiga pertanyaan dapat dirumuskan; *Pertama*, bagaimana pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) di Indonesia?, *Kedua*, bagaimana mutu perguruan tinggi di Indonesia?, dan *Ketiga*, bagaimana efektifitas pengelolaan Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT) dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi di Indonesia?. Ketiga pertanyaan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam studi ini.

Tulisan ini didasarkan pada argument bahwa mutu PT merupakan kekuatan actual dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Mutu PT membutuhkan prasyarat, yaitu kesiapan lembaga, sumberdaya manusia, pendanaan, sarana prasarana, dan kesiapan perangkat teknologi dalam mendukung mutu PT melalui efektivitas pengelolaan AIPT. Akreditasi menjadi sangat penting untuk keberlangsungan PT tersebut, dan untuk menjamin mutu lembaga termasuk mutu lulusan. Akreditasi juga berfungsi juga sebagai pengakuan public bahwa suatu lembaga telah memenuhi standar mutu yang diterima. AIPT telah menyiapkan perangkat kompetitif, sehingga PTIN memiliki *good governance* dan system PT yang unggul, sehingga mampu berkompetitif di level internasional.<sup>15</sup> Memberikan kebijakan dengan menghadirkan system penjaminan mutu internal (SPMI), dan pengelolaan mutu PT dilakukan secara berkesinambungan.<sup>16</sup> Menyelesaikan reformasi pendidikan yang mengarah kepada peningkatan mutu dengan pendekatan konsep manajemen mutu terpadu atau Total Quality Manajemen (TQM).<sup>17</sup> AIPT dapat dilakukan melalui aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online), dengan aplikasi tersebut dapat mengurangi potensi gagal, karena bisa memberikan peluang akses dimana saja, dan kapan saja untuk menjamin mutu PT.

---

<sup>15</sup>Wajdi, M. B. N. (2016). Metamorfosa Perguruan Tinggi Agama Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 4(1), 92-109. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2227>

<sup>16</sup>Arifudin, O. (2019). MANAJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169

<sup>17</sup>Khairiah, K. (2015). Pengaruh Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan PTAIN. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 8(2).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah dan mendalam yang dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia”.

## **B. Kontribusi Penelitian**

1. Kontribusi secara teoritik
  - a. Sebagai sumber atau rujukan dalam rangka untuk melengkapi data dan hasil penelitian ilmiah terdahulu khususnya tentang langkah-langkah dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
  - b. Dapat dijadikan sebagai langkah atau strategi bagi para pengelola Perguruan Tinggi Negeri dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
2. Kontribusi secara praktik
  - a. Efektivitas Pengelolaan AIPT pada Perguruan Tinggi Negeri masih sangat diperlukan, dengan pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi Swasta saat ini sudah mulai menjadi saingan yang nyata bagi Perguruan Tinggi Negeri dalam merekrut mahasiswa. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai langkah konkrit dalam meningkat mutu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
  - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah, pengelola Perguruan Tinggi dan stakeholder terkait dapat berkolaborasi secara professional dan proposional dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) di Indonesia?
2. Bagaimana mutu Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT) dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi di Indonesia?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan mutu Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia

3. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPT) dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia

#### **E. Kajian terdahulu yang relevan**

1. Penelitian Maisah, dkk. (2020) dengan judul Strategi Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pengembangan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi tidak terlepas dari upaya untuk menyakinkan masyarakat dengan cara melahirkan lulusan yang mampu berdaya saing ditengah-tengah kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman, meningkatkan akreditasi Perguruan Tinggi sehingga nantinya akan melahirkan citra public Perguruan Tinggi yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat luas, kemudian meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi keilmuannya. Sebagaimana diketahui bahwa persaingan antar lembaga pendidikan nyaris tidak ada bedanya dengan sektor bisnis, hanya saja persaingan antar lembaga pendidikan masih terkendali dengan adanya nilai-nilai luhur yang melekat pada sosok pendidik.<sup>18</sup>
2. Penelitian Muhammad Rashif Anshari, (2021), Fungsi Penilaian Instrumen Akreditasi Bagi Institusi Perguruan Tinggi Baru. Adapun fokus penelitian ini lebih cenderung ke aspek hukum dan system penilaian akreditasi bagi Institusi Perguruan Tinggi Negeri. Adapun hasil penelitian bahwa proses akreditasi memuat prinsip independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, sehingga Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melaksanakan berdasarkan asas dan prinsip tersebut berdasarkan Peraturan Perundangan namun didalam pelaksanaannya, kebijakan yang mengatur tentang akreditasi itu sendiri belum menjamin asas keadilan hukum yang menyeluruh. Disatu sisi Perguruan Tinggi Baru juga harus mandiri dan berupaya menyesuaikan Sistem Pendidikannya dengan SN Dikti, pada sisi lain Pemerintah dan BAN-PT perlu membuat formulasi aturan yang baru baik itu penambahan, perubahan/amademen pada hilir regulasi areditasi perguruan tinggi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Maisah, Hairul Fauzi, dkk. (2020), *Strategi Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi*, Kantor : Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT), Volume 1, Issue 5, Mei 2020.

<sup>19</sup>Muhammad Rashif Anshari, (2021), *Fungsi Penilaian Instrumen Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi Baru*.

3. Penelitian Qausya Faviandhani dan Dwi Ayus Lusua, (2020), dengan judul Analisis Sentiment Mahasiswa Manajemen Tahun Pertama Terhadap Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Swasta. Adapun fokus dan latar belakang penelitian ini adalah pemilihan perguruan oleh calon mahasiswa berdasarkan tingkat akreditasi perguruan tinggi. Dengan hasil penelitian Perguruan Tinggi Swasta harus mengupayakan untuk memperoleh akreditasi institusi A. Dari 7 standar AIPT bahwa mahasiswa tahun pertama hanya melihat (dari yang paling banyak) standar 6 tentang pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi, standar 4 tentang sumber daya manusia, standar 5 tentang kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik dan standar 3 tentang mahasiswa dan lulusan.<sup>20</sup>
4. Penelitian Marselinus Heriteluna, (2021), dengan judul Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Budaya Bukti (*Culture of Evidence*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan Perguruan Tinggi adalah suatu jawaban dalam menghadapi tantangan masa depan yang terdiri dari peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi, mempertahankan jati diri Perguruan Tinggi sebagai wadah masyarakat intelektual, dan mengembangkan integritas perilaku dan kualitas kehidupan internal kampus. Mutu Perguruan Tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi Perguruan Tinggi. Hasil akreditasi Perguruan Tinggi memberikan dampak yang beragam baik sifatnya internal maupun eksternal.<sup>21</sup>

Keempat penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu, seperti masalah, metode dan analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji tentang kondisi mutu Perguruan Tinggi, dampak mutu, namun tidak menekankan tentang efektifitas pengelola AIPT dalam meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

---

Politeknik Unggulan Kalimantan Kota Banjarmasin, Jurnal Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2 bulan Juli 2021.

<sup>20</sup>Qausya Faviandhani dan Dwi Ayus Lusua, (2018). *Analisis Sentiment Mahasiswa Manajemen Tahun Pertama Terhadap Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Swasta*. Universitas Narotama Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen Magistra Vol.2.No.2 September 2018.

<sup>21</sup>Marselinus Heriteluna, (2017), *Akreditasi Perguruan Tinggi dan Budaya Bukti (Culture of Evidence)*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya. Jurnal SEPAKAT Vol.4 No.1, Desember 2017.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritik**

##### **1. Efektivitas Pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)**

Efektifitas merupakan ukuran capaian tugas atau ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan, atau bisa dimaknai juga taraf tercapainya tujuan. Sebagaimana Fadila, R.N., dkk. (2020) Efektifitas merupakan tingkat pencapaian tujuan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada baik pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan, serta memiliki lingkungan yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keefektifan dapat dilihat dari kepemimpinan situasional, program kemitraan, program pendidikan, sarana prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, serta output lembaga pendidikan.<sup>22</sup> Perguruan Tinggi dewasa ini belum menunjukkan tata kelola yang efektif, ditandai dengan pengelolaan yang belum berintegritas pada pengendalian mutu, proses impelentasi mutu, peningkatan kompetensi profesionalisme, dan kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan mutu belum efektif.<sup>23</sup> Dengan demikian, efektifitas merupakan tercapainya tujuan mutu secara efektif dan efisien dalam pengelolaan suatu institusi.

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu lembaga pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagaimana Ahmad, A. (2022) menjelaskan standar pengelolaan tersebut menjadi acuan dalam mengelola sebuah program dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut, sesuai standar nasional pendidikan yang terdiri dari 8 standar pendidikan yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian Pendidikan; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6)

---

<sup>22</sup>Fadila, R. N., Lutfiani, E. A., Ramadiani, I. S., Veronika, N., Rachmanto, D., & Arfinanti, N. (2020). Efektivitas pengelolaan sumber daya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 81-88. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.28997>

<sup>23</sup> Prasetyo, M. A. M., & Husaini, H. (2021). Efektivitas Pengelolaan Mutu Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. *Improvement: Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 8(1), 29-39.

Standar Sarana Prasarana; (7) Standar Pengelolaan; (8) Standar Pembiayaan Pendidikan. Kedelapan standar tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu, agar satuan pendidikan tersebut mempunyai sertifikasi dan terakreditasi.<sup>24</sup> Pengelolaan akreditasi dan pengelolaan jurnal yang merupakan wadah publikasi dari hasil tridarma PT menjadi tren positif di berbagai PT, karena kualitas pengelolaan tersebut menjadi penentu mutu PT, baik mutu berbasis website yaitu *webometrics* maupun mutu akreditasi.<sup>25</sup>

Akreditasi merupakan proses penentuan standar mutu dan penilaian lembaga pendidikan (Pendidikan Tinggi) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai salah satu upaya pemerintah menetapkan kualitas program studi dan institusi perguruan tinggi di Indonesia. Akreditasi juga merupakan benchmark yang sangat positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi juga merupakan suatu proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan, dan hasil akreditasi merupakan pengakuan suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak menyelenggarakan program-programnya. Akreditasi juga merupakan penilaian hasil belajar agar dapat digunakan sebagai bagian proses akreditasi kelembagaan dan institusi serta pendidik berkolaborasi dalam upaya akreditasi tersebut.

Akreditasi berlandaskan Undang-undang No.02/1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No.12/2003 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang No.20/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri No.032/2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permen No.044/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permen No.062/2016

---

<sup>24</sup>Ahmad, A. (2022). Standar Pengelolaan Program Pendidikan Nonformal Dari Perspektif Akreditasi. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(1), 42-49. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v5i1.2403>

<sup>25</sup>Sucipto, S. (2021). Pendampingan Manajemen Pengelolaan Jurnal Ilmiah untuk Persiapan Akreditasi Jurnal Nasional di Universitas Tulungagung. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 62-69. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.28>

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No.32/2016, BAN-PT mengembangkan instrumen akreditasi yang relevan dengan pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia dan mengikuti perkembangan global. BAN-PT mengembangkan instrumen akreditasi program studi (IAPS) versi 2018, yang secara singkat ditulis IAPS 4.0, IAPS 1.0 (1996); IAPS 2.0 (2000), IAPS 3.0 (2008), IAPS 4.0 menggunakan 9 kriteria yaitu; visi, misi, tujuan dan strategi, tata pamong, tata kelola dan kerjasama, mahasiswa, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran dan capaian tridharma.<sup>26</sup> Oleh karena itu, akreditasi menjadi sangat penting khususnya Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)

Akreditasi Instutusi Perguruan Tinggi (AIPT) merupakan proses penilaian dan menentukan status mutu PT berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, dan sebagai hasil AIPT merupakan status mutu PT yang diumumkan kepada masyarakat. Sebagaimana Muhammad R. A. (2021) menjelaskan proses akreditasi memuat prinsip independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, sehingga Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melaksanakan berdasarkan asas dan prinsip tersebut berdasarkan Peraturan Perundangan namun didalam pelaksanaannya, kebijakan yang mengatur tentang akreditasi itu sendiri belum menjamin asas keadilan hukum yang menyeluruh.<sup>27</sup>

Aspek penilaian AIPT meliputi; (1) kondisi eksternal; (2) profil institusi; (3) kriteria PT (memiliki rencana pengembangan, rencana strategis, dokumen formal tata pamong (bukti yang shahih dokumen formal kebijakan dan peraturan, struktur organisasi, praktik penyelelenggaraan GUG, lembaga penegakan kode etik, kepemimpinan, system pengelolaan fungsional dan operasional PT, implementasi kebijakan dan pedomannya, prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan, indikator kinerja tambahan, laporan pencapaian kinerja, pelaksanaan system penjaminan mutu, pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan, layanan kemahasiswaan,

---

<sup>26</sup>Wali, M., Syarifuddin, Iqbal, T., & Salam, A. (2022). Perancangan Aplikasi Manajemen Akreditasi sebagai Layanan Peningkatan Mutu Institusi. *Journal Innovations Computer Science*, 1(1), 36–49. <https://doi.org/10.56347/jics.v1i1.29>

<sup>27</sup>Muhammad Rashif Anshari, (2021), *Fungsi Penilaian Instrumen Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi Baru*. Politeknik Unggulan Kalimantan Kota Banjarmasin, Jurnal Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2 bulan Juli 2021.

kecukupan dosen PTN, tenaga kependidikan, keuangan, sarana prasarana, IKU, pendidikan, pembelajaran; pengembangan kurikulum, ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum, pembelajaran, intergrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, luaran dan capaian tridarma, indikator kinerja utama, pendidikan dan capaian pembelajaran); dan (4) analisis dan penetapan program pengembangan (analisis SWOT atau analisis lain yang relevan), program pengembangan, program keberlanjutan.<sup>28</sup> Dengan demikian, efektivitas pengelola akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) menjadi kunci utama dalam menentukan mutu Perguruan Tinggi.

## **2. Mutu Perguruan Tinggi**

Mutu Perguruan Tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi Perguruan Tinggi. Hasil akreditasi Perguruan Tinggi memberikan dampak yang beragam baik sifatnya internal maupun eksternal.<sup>29</sup> Sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menyebutkan bahwa akreditasi kampus menggunakan A, B, C sebelum 1 Oktober 2018 untuk AIPT, dan sebelum 1 April 2019 untuk akreditasi Prodi (APS), penilaian tersebut menggunakan instrument akreditasi 7 standar. Dan setelahnya, instrument akreditasi berubah menjadi instrument akreditasi Prodi 4.0 (IAPS 4.0), Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 (IAPT 3.0), nilai/ peringkat akreditasi pun berubah menjadi Unggul, Baik Sekali, dan Baik, serta nilai dibawahnya dinyatakan tidak terakreditasi.

Mutu PT terbagi menjadi 2 jenis yaitu (1) mutu PT berbasis akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT, dan (2) mutu PT berbasis website yaitu pemeringatan *webometrics*, yang sistem penilaian kinerja meliputi empat indikator yaitu presence, visibility impact, openness, dan excellence. *Pertama*, Mutu PT berbasis akreditasi. Mutu PT dapat ditingkatkan melalui system akreditasi, karena akreditasi merupakan

---

<sup>28</sup>Dokumen Lembaga Penkaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

<sup>29</sup>Marselinus Heriteluna, (2017), *Akreditasi Perguruan Tinggi dan Budaya Bukti (Culture of Evidence)*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya. Jurnal SEPAKAT Vol.4 No.1, Desember 2017.

salah satu bentuk system penjaminan mutu eksternal PT, dan akreditasi menjamin mutu eksternal yang digunakan lembaga berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu, berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. SAPTO merupakan system yang dikembangkan BAN-PT untuk mendukung setiap proses yang dilakukan dalam akreditasi seperti pengajuan usulan akreditasi, pemeriksaan dokumen, penugasan asesor dan validasi.<sup>30</sup> Mutu PT dapat ditingkatkan melalui; (1) system penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti) secara sistemik, atau berencana dan berkelanjutan baik dalam system penjaminan mutu internal (SPMI) maupun system penjaminan mutu eksternal (SPME); (2) perencanaan berupa rencana strategis, kebijakan mutu, sasaran mutu, identifikasi penanganan resiko, membuat prosedur kerja, intruksi kerja, SOP dan formulir kerja; dan (3) manajemen mutu terpadu atau total quality managemen (TQM) untuk mengelola perubahan pendidikan dalam menghadapi tekanan global.<sup>31</sup> Mutu PT juga dapat ditingkatkan melalui pemodelan system informasi penjaminan mutu berbasis integrasi akreditasi BAN-PT dan ISO 9001:2008 yang didasarkan pada prinsip ISO 9001:2008 yaitu konsep Plan-Do-Check-Action yang berkesesuaian dengan standar akreditasi beserta elemen penilaiannya.<sup>32</sup> Mutu PT juga terlihat pada pengelolaan pengembangan sarana prasarana.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Febriyanti, N. F., Handoyo, E., & Soetrisno, Y. A. A. (2021). Sistem Importing dan Processing Data Instrumen Akreditasi Berbasis Pyspark Dan Mysql. *Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 10(1), 92-97.

<sup>31</sup> Fitriani, L. P. W., & Kemenuh, I. A. A. (2021). Peningkatan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi melalui implementasi manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2).

<sup>32</sup> Legowo, M. B., Indarto, B., & Prayitno, D. (2018). MODEL SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU BERBASIS INTERGRASI AKREDITASI BAN-PT DAN ISO 9001: 2008 DENGAN PENDEKATAN METODE EKD-CM. *PROSIDING SNAST*, 301-314.

<sup>33</sup> Suharyanto H.Soro, Kadar Budiman, Dudi Suprihadi and Nur Ainayah (2023) "Implementasi Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Di Institut Perguruan Tinggi (IPI) Garut", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(2), pp. 291–303. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i2.669

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis teori Iceberg yang merupakan sebuah istilah atau teori yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah bongkahan es yang mengapung di atas permukaan lautan. Biasanya iceberg sangat besar, namun uniknya hanya sekitar 10 % dari keseluruhan iceberg yang dapat kita lihat di permukaan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mempunyai penekanannya dengan sifat deskriptif, lebih menonjolkan analisis, selanjutnya menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan penelitian. Hal ini bisa berupa kata-kata atau lisan yang telah didapat dari informan penelitian, perilaku atau sikap informan dipaparkan.<sup>34</sup> Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan melalui investigasi secara sistematis dan mengumpulkan data, angket dan diformulasikan dengan ilmu statistik ataupun secara matematika.

##### **B. Waktu dan lokasi penelitian**

Penelitian ini dimulai bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September 2024. Penelitian ini memakan waktu lebih kurang 8 (delapan) bulan kalender. Adapun lokasi penelitian yaitu Perguruan Tinggi Negeri Umum dan Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan yang ada di Sumatera, Jawa dan di luar pulau Jawa.

##### **C. Subjek/informan penelitian**

Subjek/informan penelitian adalah para pengelola Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) bagi Perguruan Tinggi Negeri Umum dan Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan yang ada di Sumatera, Jawa dan di luar pulau Jawa serta pihak terkait lainnya selama memiliki relevansi dengan kebutuhan penelitian ini.

##### **D. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang didapat oleh peneliti secara langsung dari informan,

---

<sup>34</sup>Lexi J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h.4

yakni para pengelola AIPT Perguruan Tinggi Negeri dan unsur terkaitnya. Pada Penelitian ini yang merupakan sumber data primer adalah pengelola LPM UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe, IAIN Takengon, dan UIN Syarif Hidayatullah. Sedangkan data skunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan peneliti misalnya dari foto, dokumen, arsip, buku dan bahan lainnya selama memiliki relevansi dengan kepentingan penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Adapun jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang yang diobservasi.<sup>35</sup>

### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan oleh peneliti sebagai suatu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara tidak sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>36</sup>

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti atas data yang didapat baik berupa dokumen, arsip, gambar secara langsung maupun dokumen secara elektronik atau online.

## **F. Teknik Analisis Data Menggunakan Teori Iceberg**

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Iceberg (teori gunung Es) yang merupakan sebuah istilah atau teori yang biasanya digunakan untuk

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.145-146.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h.139-140.

menggambarkan sebuah bongkahan es yang mengapung di atas lautan. Iceberg biasanya sangat besar, namun uniknya hanya sekitar 10 % dari keseluruhan iceberg yang dapat kita lihat di permukaan. Sedangkan sisa yang 90 % berada di bawah permukaan laut. Dari gambaran teori Iceberg ini didapatlah sebuah teori untuk menggambarkan akar dari sebuah permasalahan dan bagaimana melihat suatu permasalahan secara lebih komprehensif dan diharapkan bisa memberikan solusi yang efektif.<sup>37</sup> Dalam teori Iceberg terdapat beberapa point besar yang menjadi struktur suatu permasalahan dan kejadian, yaitu: *Events* (kejadian), *Pattrens* (tren, pola), *System/structure* (struktur pembentukan), *mental models/cultures* (nilai atau budaya), *Rethinking* (paradigm, perspektif), *Redesigning* (desain, kebijakan, program), *Reframing* (memastikan capai sikap, kebiasaan baru) dan *Reacting* (kemampuan bertindak dengan tepat), sebagaimana gambar 1 dibawah ini .



System Thinking Iceberg Model (Bryan et al, 2006)

<sup>37</sup> Debrarian, *Konsep Iceberg Model Dalam Memahami Root-Causes Suatu Kejadian, Case : Kasus Korupsi*, diakses melalui <https://www.debrarianuhut.web.id/creating-value-added/gagasan/konsep-iceberg-model-dalam-memahami-root-causes-suatu-kejadian-case-kasus-korupsi/>. Tanggal 18 Agustus 2023, pukul 13.45 WIB.



## **G. Teknik Keabsahan Data**

### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Perpanjangan keikutsertaan adalah suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan keabsahan data yaitu dengan ikut serta dalam aktivitas objek penelitian, selama kegiatan tersebut memiliki relevansi dan kepentingan penelitian. Hal ini diharapkan peneliti mendapatkan informasi secara maksimal atas fenomena yang diteliti.<sup>38</sup>

### **2. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan adalah suatu teknik yang harus dapat dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan pengamatan atas objek penelitian sehingga mendapatkan informasi secara maksimal dan dapat memecahkan masalah penelitian. Dengan teknik ini diharapkan peneliti bisa menemukan permasalahan yang unik, menarik dan memberikan solusi atas masalah penelitian yang dilakukan.

### **3. Triangulasi Data**

Triangulasi data teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengecek, membandingkan derajat kepercayaan atas informasi yang telah didapat melalui instrument atau alat penelitian kualitatif dan kuantitatif.

## **H. Rencana Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa BAB yaitu; BAB I. Latar Belakang Masalah, Kontribusi Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Konsep atau teori yang Relevan. BAB II. Landasan teori tentang Efektivitas Pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia. BAB III. Metodologi Penelitian. BAB IV. Hasil penelitian dan pembahasan. BAB V. Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>38</sup> Moeloeng, Lexy J, *Metode Penelitian*.....h. 327.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian.**

##### **1. Pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)**

Pengelolaan akreditasi merupakan proses sistematis untuk menilai sebuah institusi dalam memenuhi standar kualitas. Sebagaimana ditetapkan dalam badan akreditasi pasal 55 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Pengelolaan penilaian akreditasi juga sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengelolaan akreditasi institusi perguruan tinggi mengacu pada pengendalian mutu pada konsep siklus daur hidup organisasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, proses implementasi mengacu pada sasaran teknis seperti kelengkapan formal pembelajaran, peningkatan kompetensi profesionalisme dosen dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta studi banding, kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi peningkatan mutu dilakukan melalui rapat rutin mingguan, rapat tengah semester dan awal tahun pelajaran. Implikasi hasil penelitian termanifestasikan dalam bentuk pembinaan berbasis reward dan punishment.<sup>39</sup> Oleh karena itu akreditasi perlu dikelola dengan baik

Pengelolaan AIPT dilakukan berdasarkan panduan penyusunan laporan evaluasi diri AIPT 3.0 oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2019 (BAN-PT). Laporan evaluasi diri ini juga memuat 9 kriteria akreditasi yaitu; (1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi; (2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (3) Mahasiswa; (4) Sumber Daya Manusia; (5) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (6) Pendidikan; (7) Penelitian; (8) Pengabdian kepada Masyarakat; dan (9) Luaran dan Capaian Tridharma.

Penelitian ini dilakukan terhadap 75 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Namun, dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia, maka hanya berfokus pada lima PTN yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Institut Agama Islam Negeri Lhoksemawe, Institut Agama Islam Negeri Takengon dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hasil penelitian dari kelima perguruan tinggi negeri tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut;

---

<sup>39</sup> Muhammad Anggun Manumanoso Prasetyo, & Husaini, H. (2021). Efektivitas Pengelolaan Mutu Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. *Improvement: Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 8(1), 29-39. <https://doi.org/10.21009/improvement.v8i1.19308>

**Tabel 1. Pengalaman Pengelolaan Akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia (UIN Ar-Raniry, UIN Syarif Hidayatullah, IAIN Lhokseumawe, IAIN Takengon, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)**

No	Kriteria/Elemen	Indikator	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu
1.	<b>C.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b> C.1.4 Indikator Kinerja Utama	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	UIN Ar-Raniry telah memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan (3)	UIN Syarif Hidayatullah telah memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada	IAIN Lhokseumawe telah memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan (3)	IAIN Takengon memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang telah dilaksanakan dan 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini (2)	UIN FAS Bengkulu telah memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang telah dilaksanakan dan 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini (2)

				nation economic development (4)			
2.	<b>C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b> C.2.4 Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong	A. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko (3)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko (3)	IAIN Takengon telah memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko (2)	UIN FAS Bengkulu telah memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko (2)
		B. Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi	Tersedianya bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif	Tersedianya bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan	IAIN Lhokseumawe memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi	IAIN Takengon memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi	UIN FAS Bengkulu memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi

			dan efisien pada UIN Ar-Raniry (4)	secara konsisten, efektif dan efisien pada UIN Syarif Hidayatullah (4)	yang dilaksanakan secara konsisten (3)	(2)	yang dilaksanakan secara konsisten (3)
	C. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Tersedianya dokumen formal struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien pada UIN Ar-Raniry (4)	Tersedianya dokumen formal struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien pada UIN Syarif Hidayatullah (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten (3)	IAIN Takengon memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi (2)	
	D. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup	UIN Ar-Raniry telah memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas,	UIN Syarif Hidayatullah telah memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup	IAIN Lhokseumawe memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk	IAIN Takengon memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk	UIN FAS Bengkulu memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan	

		aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten. UIN Ar-Raniry telah mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (3)	aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten. UIN Syarif Hidayatullah telah mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (3)	industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi (2)	industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi (2)	GUG namun hanya mencakup beberapa aspek GUG (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko) (1)
		E. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	UIN Ar-Raniry memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas (2)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten (3)	IAIN Lhokseumawe memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas (2)	IAIN Takengon memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas (2)
	C.2.4.b) Kepemimpinan	A. Efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan	Pimpinan UIN Ar-Raniry telah merealisasikan seluruh rencana strategis dan	Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah telah merealisasikan	Pimpinan IAIN Lhokseumawe merealisasikan seluruh rencana strategis	Pimpinan IAIN Takengon merealisasikan seluruh rencana strategis	Pimpinan UIN FAS Bengkulu merealisasikan seluruh rencana strategis

		pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional	operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional (3)	seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional (3)	dan operasional melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional (2)	dan operasional melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional (2)	dan operasional melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional (2)
		B. Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya	Pimpinan UIN Ar-Raniry telah mampu mengambil keputusan strategis dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai	Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah telah mampu mengambil keputusan strategis dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi	Pimpinan IAIN Lhokseumawe mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai	Pimpinan IAIN Takengon mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai	Pimpinan UIN FAS Bengkulu mampu mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai

		visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi	agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi (3)	perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi (3)	motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi (2)	motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi (2)	motivator untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi (2)
		C. Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik	Pimpinan UIN Ar-Raniry telah menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional (4)	Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah telah menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional (4)	Pimpinan IAIN Lhokseumawe menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan (2)	Pimpinan IAIN Takengon menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan (2)	Pimpinan UIN FAS Bengkulu menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat wilayah/nasional (3)
	C.2.4.c) Pengelolaan	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem	UIN Ar-Raniry memiliki bukti formal	UIN Syarif Hidayatullah memiliki bukti	IAIN Lhokseumawe memiliki	IAIN Takengon memiliki bukti formal	UIN FAS Bengkulu bukti formal



		<p>pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling)</p>	<p>keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien (4)</p>	<p>formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien (4)</p>	<p>bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (2)</p>	<p>keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek (2)</p>	<p>keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten (3)</p>
		<p>B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan</p>	<p>UIN Ar-Raniry telah memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (4)</p>	<p>UIN Syarif Hidayatullah memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (4)</p>	<p>IAIN Lhokseumawe memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek (2)</p>	<p>IAIN Takengon memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek (2)</p>	<p>UIN FAS Bengkulu memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan namun belum mencakup semua aspek (1)</p>

		mutu, dan 11) kerjasama					
		C. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama	Adanya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek pada UIN Ar-Raniry (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten mencakup 11 aspek (3)	IAIN Takengon memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek (2)
		D. Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku	Tersedianya dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi	UIN Syarif Hidayatullah memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek	IAIN Lhokseumawe memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek	IAIN Takengon memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek

		kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan	sejenis tingkat nasional pada UIN Ar-Raniry (4)	dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional (4)	dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional (3)		(2)
	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut	UIN Ar-Raniry telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya	UIN Syarif Hidayatullah telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM,	IAIN Lhokseumawe telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu (3)	IAIN Takengon telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (2)	UIN FAS Bengkulu telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu (3)

			(4)	seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya (4)			
		B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur (3)	IAIN Takengon tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur (3)

		A. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 1
		B. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu
		Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (4)	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (4)	Audit eksternal pada IAIN Lhokseumawe mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) (3)	Audit eksternal pada IAIN Takengon mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) (3)	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) (3)
		Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 3	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 3
		A. Ketersediaan dokumen formal	UIN Ar-Raniry telah memiliki	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon memiliki	UIN FAS Bengkulu telah

	C.2.4.d) Kerjasama	kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra Kerjasama (4)	telah memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (4)	telah memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama (3)	memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. (2)	memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) (1)
		B. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi pada UIN Ar-Raniry (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi pada UIN Ar-Raniry	IAIN Takengon memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi (2)

					(3)		
		C. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama	UIN Ar-Raniry memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah dan nasional (3)	IAIN Takengon Perguruan tinggi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi institusi (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah dan nasional (3)
		D. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis pada UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan untuk menjamin	IAIN Lhokseumawe memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi,	IAIN Takengon memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin terwujudnya visi,	UIN FAS Bengkulu memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin

			(3)	ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis (4)	misi dan tujuan strategi (3)	terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis (2)	terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis (2)
		Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir	UIN Ar-Raniry memiliki skor 4	UIN Syarif Hidayatullah memiliki skor 4	IAIN Lhokseumawe memiliki skor 3	IAIN Takengon memiliki skor 2	UIN FAS Bengkulu memiliki skor 3
	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria	UIN Ar-Raniry memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (4)	IAIN Lhokseumawe menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (3)	IAIN Takengon tidak menetapkan indikator kinerja tambahan (2)	UIN FAS Bengkulu menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (3)



	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada tiap kriteria yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda	Analisis pencapaian kinerja UIN Ar-Raniry yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan (4)	Analisis pencapaian kinerja UIN Syarif Hidayatullah memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan (4)	Analisis pencapaian kinerja IAIN Lhokseumawe memenuhi 2 aspek (2)	Analisis pencapaian kinerja IAIN Takengon memenuhi 2 aspek (2)	Analisis pencapaian kinerja UIN FAS Bengkulu memenuhi 2 aspek (2)
	C.2.7 Penjaminan Mutu	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk	UIN Ar-Raniry telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal (4)	UIN Syarif Hidayatullah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal (4)	IAIN Lhokseumawe telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek (2)	IAIN Takengon telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek (2)	UIN FAS Bengkulu telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek (2)

	perbaikan dan peningkatan mutu					
C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk	UIN Ar-Raniry telah melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna (4)	UIN Syarif Hidayatullah telah melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna (4)	IAIN Lhokseumawe melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek dan hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan (3)	IAIN Takengon melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek (2)	UIN FAS Bengkulu melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek (2)

		perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem					
3.	<b>C.3 Mahasiswa</b> C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Seleksi pada program utama	UIN Ar-Raniry memiliki skor 4	UIN Syarif Hidayatullah memiliki skor 4	IAIN Lhokseumawe memiliki skor 2	IAIN Takengon memiliki skor 2	UIN FAS Bengkulu memiliki skor
		Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu
		Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	UIN Ar-Raniry memiliki skor 4	UIN Syarif Hidayatullah memiliki skor 4	IAIN Lhokseumawe memiliki skor 2	IAIN Takengon memiliki skor 2	UIN FAS Bengkulu memiliki skor 2
	C.3.4.b) Layanan Kemahasiswaan	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	UIN Ar-Raniry telah menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan (4)	UIN Syarif Hidayatullah telah menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	IAIN Lhokseumawe menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, dan 2) peningkatan kesejahteraan (3)	IAIN Takengon menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, dan 2) peningkatan kesejahteraan (2)	UIN FAS Bengkulu menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, dan 2) peningkatan kesejahteraan (3)

				(4)			
4.	<b>C.4 Sumber Daya Manusia</b> C.4.4 Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 2	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 3
		Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 2	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 3
		Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 2	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 3
		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap)	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 3	IAIN Takengon mendapatkan skor 3	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 4
		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 2	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 3
	C.4.4.b) Kinerja Dosen	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 3	IAIN Takengon mendapatkan skor 3	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 2

		Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 3	IAIN Takengon mendapatkan skor 3	UIN FAS Bengkulu
		Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 3	IAIN Takengon mendapatkan skor 3	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 3
	C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	UIN Ar-Raniry memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma secara efektif (3)	IAIN Takengon memiliki tenaga kependidikan yang belum memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) (2)	UIN FAS Bengkulu Lhokseumawe memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma secara efektif (3)
5.	<b>C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana</b>	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 4	IAIN Takengon mendapatkan skor 4	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 4

	C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	perolehan dana perguruan tinggi					
		Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 3	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 4
		Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 4	IAIN Takengon mendapatkan skor 4	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 4
		Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 4	IAIN Takengon mendapatkan skor 4	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 4
		Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 4	IAIN Takengon mendapatkan skor 4	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 4
		Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 3	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 2	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 2
		Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 3	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 2	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 2

	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	A. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).	UIN Ar-Raniry memiliki sarana dan prasarana yang: 1) relevan untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 2) mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri) (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki sarana dan prasarana yang: 1) relevan untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 2) mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri) (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik memungkinkan mahasiswa menggunakannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI (2)	IAIN Takengon memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik memungkinkan mahasiswa menggunakannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik memungkinkan mahasiswa menggunakannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI (2)
		B. Ketersediaan Sistem TIK	UIN Ar-Raniry memiliki sistem	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon memiliki sistem	UIN FAS Bengkulu

		<p>(Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).</p>	<p>informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi (4)</p>	<p>memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi (4)</p>	<p>memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, dan 3) lengkap dan mutakhir (2)</p>	<p>informasi untuk layanan administrasi yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, dan 3) lengkap dan mutakhir (2)</p>	<p>memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, dan 3) lengkap dan mutakhir (2)</p>
--	--	---	---	---	--	--	--



		C. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.)	UIN Ar-Raniry memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala (3)	IAIN Takengon memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), dan 2) mudah diakses oleh sivitas akademika (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala (3)
6.	<b>C.6 Pendidikan</b> C.6.4 Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan	UIN Ar-Raniry memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek	UIN Syarif Hidayatullah memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang	IAIN Lhokseumawe memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang	IAIN Takengon Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang	UIN FAS Bengkulu memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang

		<p>sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi</p>	(4)	mempertimbangkan 4 aspek (4)	mempertimbangkan aspek 1), 2) dan 3) (3)	mempertimbangkan aspek 1) dan 2) (2)	mempertimbangkan aspek 1), 2) dan 3) (3)
	B. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	<p>UIN Ar-Raniry memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional,</p>	<p>UIN Syarif Hidayatullah memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan</p>	<p>IAIN Lhokseumawe memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan</p>	<p>IAIN Takengon memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI, 2) Mekanisme</p>	<p>UIN FAS Bengkulu memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan</p>	

			<p>peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan (4)</p>	<p>benchmark pada institusi internasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan (4)</p>	<p>benchmark pada institusi nasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institus (3)</p>	<p>penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi (2)</p>	<p>benchmark pada institusi nasional, peraturanperaturan terkini, dan kepekaan terhadap isuisu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institus (3)</p>
	<p>C. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang</p>	<p>UIN Ar-Raniry memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan</p>	<p>UIN Syarif Hidayatullah memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan,</p>	<p>IAIN Lhokseumawe memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan,</p>	<p>IAIN Takengon memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan,</p>	<p>UIN FAS Bengkulu memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan,</p>	

		mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya (4)	pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya (4)	pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan (2)	pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan (2)	pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya (3)
	C.6.4.b) Pembelajaran	A. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	UIN Ar-Raniry telah memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran (4)	UIN Syarif Hidayatullah telah memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran (3)	IAIN Takengon memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran (2)
		B. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan	UIN Ar-Raniry telah memiliki pedoman yang komprehensif dan	UIN Syarif Hidayatullah telah memiliki pedoman yang	IAIN Lhokseumawe Perguruan tinggi memiliki	IAIN Takengon Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang	UIN FAS Bengkulu Perguruan tinggi memiliki

		media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (4)	komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (4)	pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (2)	penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (2)	pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (3)
		C. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	UIN Ar-Raniry telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindak lanjuti (3)	UIN Syarif Hidayatullah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan (4)	IAIN Lhokseumawe telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindak lanjuti (3)	IAIN Takengon telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi (2)	UIN FAS Bengkulu telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindak lanjuti (3)
		Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu
		A. Ketersediaan dokumen formal	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon Perguruan tinggi	UIN FAS Bengkulu

C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (4)	memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (4)	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (2)	memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (2)	Perguruan tinggi telah memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (3)
	B. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (4)	IAIN Lhokseumawe telah memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas yg terintegrasi pada kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (3)	IAIN Takengon memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (2)	UIN FAS Bengkulu telah memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas yg terintegrasi pada kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran (3)
	C. Ketersedian bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM	UIN Ar-Raniry telah memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi	UIN Syarif Hidayatullah memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan	IAIN Lhokseumawe telah memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan	IAIN Takengon memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi	UIN FAS Bengkulu telah memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan

		terhadap pembelajaran	penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti (3)	evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan (4)	evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti (3)	penelitian dan PkM terhadap pembelajaran (2)	evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti (3)
	C.6.4.d) Suasana Akademik	A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik pada UIN Ar-Raniry (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik (2)	IAIN Takengon memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik (3)
		B. Ketersediaan bukti yang sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan,	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang	UIN Syarif Hidayatullah memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik	IAIN Lhokseumawe memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik	IAIN Takengon memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan	UIN FAS Bengkulu memiliki bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik

7.	<b>C.7 Penelitian</b> C.7.4 Indikator Kinerja Utama	penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai	disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik (4)	yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik (4)	yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun namun hanya sebagian hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti (3)	kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun (2)	yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun namun hanya sebagian hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti (3)
		C. Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif (3)	IAIN Takengon memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif (3)
		A. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen formal Rencana	UIN Syarif Hidayatullah memiliki	IAIN Lhokseumawe memiliki	IAIN Takengon memiliki dokumen formal	UIN FAS Bengkulu memiliki



	C.7.4.a) Penelitian	Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional (4)	dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional (4)	dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional (3)	Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja (2)	dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional (3)
		B. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh stakeholders (3)	IAIN Takengon memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses oleh stakeholders (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh stakeholders (3)
		C. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek	UIN Ar-Raniry telah memiliki bukti yang sah tentang	UIN Syarif Hidayatullah memiliki bukti yang sah	IAIN Lhokseumawe memiliki bukti yang sah	IAIN Takengon memiliki bukti yang sah tentang	UIN FAS Bengkulu memiliki bukti yang sah

		sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian	pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti (4)	tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti (4)	tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala (3)	pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala (3)	tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala (3)
		D. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 3 dari 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait (3)	IAIN Takengon memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan/atau mitra/pemberi dana terkait (2)	UIN FAS Bengkulu i memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 3 dari 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait (3)
8.		A. Ketersediaan dokumen formal	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon memiliki	UIN FAS Bengkulu

	<b>C.8 Pengabdian kepada masyarakat</b> C.8.4 Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Pelaksanaan PkM	Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional (4)	memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional (4)	memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional (3)	dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja (2)	memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional (3)
		B. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	UIN Ar-Raniry memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan (3)	IAIN Takengon memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan (3)	UIN FAS Bengkulu memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan (3)
		C. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM	UIN Ar-Raniry memiliki bukti yang sah tentang	UIN Syarif Hidayatullah memiliki bukti	IAIN Lhokseumawe memiliki bukti	IAIN Takengon memiliki bukti yang sah	UIN FAS Bengkulu memiliki bukti

		mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.	pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti (4)	yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti (4)	yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (2)	tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (2)	yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (2)
		D. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu	UIN Ar-Raniry memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan/atau mitra/pemberi dana terkait (2)	IAIN Takengon memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan/atau mitra/pemberi dana terkait (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan/atau mitra/pemberi dana terkait (2)

	C.8.4.b) Kelompok Pelaksana PkM	Keberadaan kelompok pelaksana PkM	UIN Ar-Raniry memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional (4)	UIN Syarif Hidayatullah memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional (4)	IAIN Lhokseumawe memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dan 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di Masyarakat (3)	IAIN Takengon memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM (2)	UIN FAS Bengkulu memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dan 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di Masyarakat (3)
9.	<b>C.9 Luaran dan Capaian Tridharma</b> C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	Rata-rata IPK mahasiswa: 1) program Diploma dan Sarjana 2) program Profesi, Magister dan Doktor dalam 3 tahun terakhir	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 3	IAIN Takengon mendapatkan skor 3	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 4
		Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 3	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 3	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 3	IAIN Takengon mendapatkan skor 3	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 3

		industri dalam 3 tahun terakhir					
		Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 3	IAIN Takengon mendapatkan skor 3	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 3
		Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 3	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 3	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 2	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 2
		Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir: 1) program Doktor Terapan 2) program Magister Terapan 3) program Sarjana Terapan 4) program Diploma Tiga	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 4	IAIN Takengon mendapatkan skor 4	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 4
		Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 3	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu

				mendapatkan skor 3	mendapatkan skor 2		mendapatkan skor 3
		Persentase keberhasilan studi untuk setiap program	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 2	IAIN Takengon mendapatkan skor 2	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 3
		Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu
		Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu
		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan		UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu
		Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir	UIN Ar-Raniry mendapatkan skor 4	UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan skor 4	IAIN Lhokseumawe mendapatkan skor 4	IAIN Takengon mendapatkan skor 4	UIN FAS Bengkulu mendapatkan skor 4
		Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu
		Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu

	dosen tetap dalam 3 tahun terakhir					
	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu

## 2. Mutu Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi

Mutu Perguruan Tinggi merupakan penentu kualitas suatu perguruan tinggi, karena akreditasi menjadi alat ukur tingkat kemampuan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sanggup memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kehidupan, mampu melahirkan orang-orang yang dibutuhkan dunia kerja, mampu melahirkan sosok yang produktif membuka lapangan pekerjaan, serta mampu melahirkan orang-orang yang professional dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>40</sup> Mutu perguruan tinggi juga merupakan hasil perpaduan usaha dari semua komponen dan dijadikan sebagai salah satu alat ukur keberhasilan produsen, dengan melihat tingkat kepuasan *customers* dan *stakeholders*, baik internal maupun eksternal.<sup>41</sup>

Namun, realita di lapangan bahwa perguruan tinggi negeri masih kesulitan mencapai nilai akreditasi unggul. Sebagaimana data online Tahun 2024 <https://diktis.kemenag.go.id/v1/berita/ini-9-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-negeri-berstatus-unggul> menunjukkan bahwa dari 75 Perguruan Tinggi di Indonesia hanya 9 PTN yang memiliki predikat unggul (12%).

**Tabel 2. Kondisi Mutu Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi di Indonesia Berdasarkan Perolehan angka**

No	Kriteria/Elemen	Indikator	UIN Ar-Raniry	UIN Syarif Hidayatullah	IAIN Lhokseumawe	IAIN Takengon	UIN FAS Bengkulu
----	-----------------	-----------	---------------	-------------------------	------------------	---------------	------------------

<sup>40</sup> Khairiah, K., & Sirajuddin, S. (2019). The effects of university leadership management: efforts to improve the education quality of state institute for Islamic studies (IAIN) of Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Islam Yogyakarta*, 7(2), 239-266.

<sup>41</sup> Khairiah, K., & Ismail, S. (2023). The Function of Institutional Evaluation in the Quality of Madrasah Aliyah Education in Indonesia. *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law*, 3(1), 1-14.



1.	<b>C.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b> C.1.4 Indikator Kinerja Utama	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	(3)	(4)	(3)	(2)	(2)
2.	<b>C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b> C.2.4 Indikator Kinerja Utama C.2.4.a) Sistem Tata Pamong	A. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	(3)	(4)	(3)	(2)	(2)
		B. Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		C. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	(4)	(4)	(3)	(2)	(2)
		D. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	(3)	(3)	(2)	(2)	(1)
		E. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)
	C.2.4.b) Kepemimpinan	A. Efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional	(3)	(3)	(2)	(2)	(2)
		B. Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk	(3)	(3)	(2)	(2)	(2)

		mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi					
		C. Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
	C.2.4.c) Pengelolaan	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling)	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
		B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama	(4)	(4)	(2)	(2)	(1)
		C. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama	(4)	(4)	(3)	(2)	(2)
		D. Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai	(4)	(4)	(3)	(2)	(2)

		berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan					
C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu		A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		A. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi					(1)
		B. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.					
		Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi	(4)	(4)	(3)	(3)	(3)
		Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan	(4)	(4)	(3)	(2)	(1)

C.2.4.d) Kerjasama	(dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama					
	B. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	(4)	(4)	(3)	(2)	(2)
	C. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
	D. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	(3)	(4)	(3)	(2)	(2)
	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)
	C.2.7 Penjaminan Mutu	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)
	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu					

	C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem	(4)	(4)	(3)	(2)	(2)
3.	<b>C.3 Mahasiswa</b>	seleksi pada program utama	4	4	2	2	
	C.3.4 Indikator Kinerja Utama	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama					
	C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)
	C.3.4.b) Layanan Kemahasiswaan	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
4.	<b>C.4 Sumber Daya Manusia</b>	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
	C.4.4 Indikator Kinerja Utama	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
	C.4.4.a) Profil Dosen	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap)	(4)	(4)	(3)	(3)	(4)

		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
	C.4.4.b) Kinerja Dosen	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir	(4)	(4)	(3)	(3)	(2)
		Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir	(4)	(4)	(3)	(3)	LPM
		Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	(4)	(4)	(3)	(3)	(3)
	C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
5.	<b>C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana</b> C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
		Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	(4)	(4)	(3)	(2)	(4)
		Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
		Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
		Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
		Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	(3)	(4)	(2)	(2)	(2)
		Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	(3)	(4)	(2)	(2)	(2)

	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	A. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)
		B. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)
		C. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.)	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
6.	<b>C.6 Pendidikan</b> C.6.4 Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		B. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		C. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)

		isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya					
	C.6.4.b) Pembelajaran	A. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	(3)	(4)	(3)	(2)	(2)
		B. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
		C. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	(3)	(4)	(3)	(2)	(3)
		Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah					LPM
	C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
		B. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		C. Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	(3)	(4)	(3)	(2)	(3)
	C.6.4.d) Suasana Akademik	A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
		B. Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional. b) Keterlaksanaan	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)



		program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai					
		C. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
7.	<b>C.7 Penelitian</b> C.7.4 Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Penelitian	A. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		B. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		C. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian	(4)	(4)	(3)	(3)	(3)
		D. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
8.	<b>C.8 Pengabdian kepada masyarakat</b> C.8.4 Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Pelaksanaan PkM	A. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
		B. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	(4)	(4)	(3)	(3)	(3)
		C. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1)	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)

		tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.					
		D. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)
	C.8.4.b) Kelompok Pelaksana PkM	Keberadaan kelompok pelaksana PkM	(4)	(4)	(3)	(2)	(3)
9.	<b>C.9 Luaran dan Capaian Tridharma</b> C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	Rata-rata IPK mahasiswa: 1) program Diploma dan Sarjana 2) program Profesi, Magister dan Doktor dalam 3 tahun terakhir	(4)	(4)	(3)	(3)	(4)
		Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
		Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	(4)	(4)	(3)	(3)	(3)
		Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	(3)	(3)	(2)	(2)	(2)
		Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir: 1) program Doktor Terapan 2) program Magister Terapan 3) program Sarjana Terapan 4) program Diploma Tiga	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)

		Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
		Persentase keberhasilan studi untuk setiap program	(4)	(4)	(2)	(2)	(3)
		Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama					LPM
		Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi					LPM
		Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan					LPM
		Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
		Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir					LPM
		Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir					LPM
		Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir					LPM

### 3. Analisis Efektivitas Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dalam Mutu Perguruan Tinggi

- a. **Peristiwa/ Even;** Hanya 9 Perguruan Tinggi Islam Negeri yang memperoleh nilai akreditasi unggul dari 75 Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia.
- b. **Pola dan Tren;** Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengalami kesulitan mencapai akreditasi unggul, terlihat dari 75 Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia hanya 9 Perguruan Tinggi Islam Negeri yang memperoleh nilai akreditasi unggul atau hanya 12% PTN yang memperoleh nilai unggul. Modernisasi sistem aplikasi, sistem akreditasi Perguruan Tinggi Online, dan kriteria 9 menjadi ancaman terhadap perolehan nilai akreditasi unggul.
- c. **Sistem Struktur;** Pengelolaan AIPT pada beberapa perguruan tinggi belum efektif, seperti (1) Visi, misi, tujuan dan strategi belum mencerminkan nawacita presiden dan renstra kementerian; (2) Belum menunjukkan tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang berintegritas; (3) Mahasiswa masih kesulitan memasuki dunia kerja yang sesuai bidang keilmuan; (4) Sumber daya manusia masih sulit menerapkan sistem budaya mutu; (5) Keuangan, sarana dan prasarana belum berbasis akreditasi; (6) Pendidikan masih bersifat memenuhi tuntutan kewajiban dan belum menunjukkan budaya mutu dalam proses pembelajaran; (7) Penelitian masih bersifat pemerataan dan belum menjadi prioritas; (8) Pengabdian kepada Masyarakat belum terdapat peta atau rencana strategis; dan (9) Luaran dan Capaian Tridharma perguruan tinggi belum efektif.
- d. **Mental Model/ Paradigma;** Mindset anti pembaharuan, sebagian kepemimpinan kesulitan berkomitmen, sulit bekerjasama, sulit komunikasi, dan sumberdaya manusia kesulitan menerapkan budaya mutu. Sumber: Data dari lembaga penjaminan mutu pada 5 Perguruan Tinggi yaitu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Lhoksema Aceh, IAIN Takengon Aceh dan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- e. **Rethinking;** Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menawarkan solusi, jika perguruan tinggi mau meningkatkan mutu PT, maka efektifkan pengelolaan akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara baik, melalui visi, misi, tujuan dan strategi, tata pamong, tata telola dan kerjasama, mahasiswa, sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, luaran dan Capaian Tridharma, dengan menunjukkan peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2022 tentang mekanisme akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

- f. **Redesigning;** Dialog antar pimpinan dan seluruh sumberdaya yang ada dalam institusi perguruan tinggi serta seluruh *stakeholders* yang terkait dengan institusi perguruan tinggi membuat kebijakan dan keputusan, untuk mencari titik temu, tanpa kekerasan, melalui kedamaian, dan membangun kesadaran budaya mutu dalam menghadapi tuntutan budaya mutu global.
- g. **Refreming;** Perguruan tinggi wajib mengikuti sistem mutu yang telah ditetapkan pemerintah secara nasional, dengan mempelajari dan memahami peraturan dan perundang-undangan seperti; Undang-undang No.02/1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No.12/2003 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang No.20/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri No.032/2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permen No.044/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permen No.062/2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No.32/2016, BAN-PT mengembangkan instrumen akreditasi yang relevan dengan pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia dan mengikuti perkembangan global. BAN-PT mengembangkan instrumen akreditasi program studi (IAPS) versi 2018, yang secara singkat ditulis IAPS 4.0, IAPS 1.0 (1996); IAPS 2.0 (2000), IAPS 3.0 (2008), IAPS 4.0 menggunakan 9 kriteria yaitu; visi, misi, tujuan dan strategi, tata pamong, tata kelola dan kerjasama, mahasiswa, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran dan capaian tridharma.
- h. **Reacting/ Future reality;** Mutu perguruan tinggi efektif yaitu perguruan tinggi yang terakreditasi unggul melalui efektivitas pengelolaan akreditasi institusi perguruan tinggi yang baik, perguruan tinggi yang sudah mendapatkan SK atau sertifikat akreditasi melalui Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 795/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, bahwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kota Banda Aceh memenuhi syarat peringkat Akreditasi Unggul, UIN Syarif Hidayatullah SK ..... IAIN Lhoksemawe SK ..... IAIN Takengon SK ..... UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu SK ..... sudah sesuai mekanisme dan prosedur hukum, literasi, dan pengakuan secara adil dari pihak yang berwenang.

## B. Pembahasan

### 1. Pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dalam Mutu Perguruan Tinggi

Pengelolaan akreditasi institusi perguruan tinggi mengalami perubahan dari kriteria 7 menjadi kriteria 9. Hasil akreditasi perguruan tinggipun memberikan dampak yang beragam baik sifatnya internal maupun eksternal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menyebutkan bahwa akreditasi kampus menggunakan A, B, C sebelum 1 Oktober 2018 untuk AIPT, dan sebelum 1 April 2019 untuk akreditasi Prodi (APS), penilaian tersebut menggunakan instrument akreditasi 7 standar, dan setelahnya, instrument akreditasi berubah menjadi instrument akreditasi Prodi 4.0 (IAPS 4.0), Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 (IAPT 3.0), nilai/ peringkat akreditasi pun berubah menjadi Unggul, Baik Sekali, dan Baik, serta nilai dibawahnya dinyatakan tidak terakreditasi. Dengan perubahan akreditasi tersebut, maka pengelolaan akreditasi menciptakan kesulitan dalam mencapai unggul. Pengelolaan AIPT sebelumnya bisa mengadakan isi borang dalam seketika, namun dalam IAPT 3.0 menjadi kesulitan mendapatkan dokumen borang dan tidak bisa lagi bohong dan ngarang. Pengelola IAPT kesulitan mengumpulkan dokumen seperti; (1) Visi, misi, tujuan dan strategi belum mencerminkan nawacita presiden dan turunan renstra kementerian kepada institusi; (2) Belum menunjukkan tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang berintegritas; (3) Mahasiswa yang lulus masih kesulitan memasuki dunia kerja yang sesuai bidang keilmuan; (4) Sumber daya manusia masih sulit menerapkan budaya mutu; (5) Keuangan, sarana dan prasarana belum berbasis akreditasi; (6) Pendidikan masih bersifat memenuhi tuntutan kewajiban dan belum menunjukkan budaya mutu dalam proses pembelajaran; (7) Penelitian masih ada institusi bersifat pemerataan dan belum menjadi prioritas; (8) Pengabdian kepada Masyarakat belum terdapat peta atau rencana strategis, sehingga implementasi PkM masih terjadi seketika atau terkesan mendadak; dan (9) Luaran dan Capaian Tridharma sebagian perguruan tinggi masih dikategorikan belum efektif.

Kecenderungan ketidakefektivan pengelolaan akreditasi institusi perguruan tinggi yang telah menjadi fenomena dalam menyediakan skala besar partisipasi interaktif dan akses mutu secara terbuka baik secara langsung maupun secara online. Sebagaimana hasil penelitian Ghofur dkk. (2024) menunjukkan bahwa penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan luaran, capaian tridharma masih perlu strategi khusus, dan sumberdaya manusia, pendidikan belum mengukur semua aktifitas

akademik pada prodi.<sup>42</sup> Faktor penyebab ketidakefektivan pengelolaan akreditasi perguruan tinggi karena kurangnya alokasi anggaran pendidikan, kurangnya sarana prasarana, kurangnya kerjasama keterlibatan seluruh *stakeholder* pendidikan, kurangnya sumberdaya finansial.<sup>43</sup> Faktor penghambat lainnya adalah pengelolaan pangkalan data masih lemah dan koordinasi serta komitmen antar kepemimpinan masih dirasa kurang.<sup>44</sup> Ada juga penghambat keefektivan akreditasi institusi perguruan tinggi yaitu karena belum adanya roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>45</sup> Oleh karena itu, rendahnya mutu pendidikan perguruan tinggi disebabkan ketidakefektivannya pengelolaan akreditasi perguruan tinggi pada perguruan tinggi di Indonesia.

## **2. Mutu Perguruan Tinggi dalam Mutu Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi**

Mutu Perguruan Tinggi pada beberapa perguruan tinggi masih dalam kategori rendah, merupakan tingkat kemampuan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat, dan dunia kerja, mampu melahirkan tenaga profesional dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mutu perguruan tinggi juga merupakan tingkat keberhasilan produsen, dengan melihat tingkat kepuasan *customers* dan *stakeholders*, baik internal maupun eksternal. Namun, realita mutu perguruan tinggi di lapangan bahwa perguruan tinggi negeri masih kesulitan mencapai nilai akreditasi unggul. Sebagaimana data online Tahun 2024 <https://diktis.kemenag.go.id/v1/berita/ini-9-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-negeri-berstatus-unggul> menunjukkan bahwa dari 75 Perguruan Tinggi di Indonesia hanya 9 Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki predikat unggul (12%).

Rendahnya mutu perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia disebabkan; (1) visi, misi, tujuan dan strategi sudah memiliki namun masih sulit dalam pengembangan jangka panjang, menengah dan jangka pendek; (2) tata pamong, tata kelola dan kerjasama belum efektif dalam perwujudan university

---

<sup>42</sup> Ghofur, M. A., Sovian, A., Andi, A., & Jonathan, P. (2024). 3. MANAJEMEN STRATEGI AKREDITASI PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI MILITER. *TNI Angkatan Udara*, 3(1).

<sup>43</sup> Hasanah, N., Nur, M. A., Rahmatillah, S. A., Darwisa, D., & Putri, K. H. (2024). Analisis faktor penghambat dan upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar negeri. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(5), 3162-3169.

<sup>44</sup> Jubaedah, D., & Aulia Fatahillah, I. (2018). Peran pengelolaan pangkalan data terhadap akreditasi program studi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.

<sup>45</sup> Lessy, D., Riaddin, D., Supriadi, N., & Sehuwaky, N. (2022). Implementasi Akreditasi Program Studi Berbasis 9 Kriteria Menuju Peringkat Unggul (Studi Kasus di Program Studi Pendidikan Matematika IAIN Ambon dan Program Studi Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung). *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 14-33.

governance seperti kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tanggung jawab serta integritas masih sulit efektif, kepemimpinan belum efektif, pengelolaan fungsional dan operasional juga belum efektif pada perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pergerakan dan pengawasan.

A. Efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional
B. Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi
C. Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik
A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling)
B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama
C. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama
D. Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan
A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut
A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.
A. Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi
B. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi
Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan m
B. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
C. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama
D. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir
Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria



Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada tiap kriteria yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) c
Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mu 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keua dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaks secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindakla secara berkala dan tersistem
seleksi pada program utama
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa
Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan
Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi
Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap
Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap)
Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.
Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir
Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir
Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll)
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi
A. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).
B. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaan Perguruan Tinggi/ SIMPT).
C. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ P PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.)

A. Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri
B. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum
C. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku, menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya
A. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman
B. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran
C. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran
<b>Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah</b>
A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
B. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
C. Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran
A. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
B. Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademik, dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung sarana dan prasarana yang memadai
C. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik
A. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator
B. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
C. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian
D. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) disampaikan tepat waktu
A. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator
B. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya
C. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) pelaksanaan PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
D. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) disampaikan tepat waktu
Keberadaan kelompok pelaksana PkM
Rata-rata IPK mahasiswa: 1) program Diploma dan Sarjana 2) program Profesi, Magister dan Doktor dalam 3 tahun terakhir
Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. T-5)
Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. T-5)
Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir: 1) program Doktor Terapan 2) program Magister Terapan 3) program Sarjana Terapan 4) program Diploma Tiga
Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program

Persentase keberhasilan studi untuk setiap program
Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir
Jumlah publikasi di seminar/tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir
Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir

Temuan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berdasarkan data empirik yang ditemukan maka dapat diketahui terdapat beberapa pokok persoalan yang dapat menghambat keberhasilan perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Kurang Memadai Sarana dan Prasarana di Pendidikan Tinggi Saat ini kondisi sarana prasarana kampus perguruan tinggi di Indonesia masih banyak yang belum memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang bermutu. Fenomena ini tidak hanya di daerah terpencil akan tetapi di kota-kota besar sekali pun masih kita temukan, seperti: masih terdapat ruang kelas yang tidak layak sebagai tempat proses pembelajaran sebuah perguruan tinggi, terbatasnya buku referensi yang dimiliki perpustakaan kampus, serta kurang memadainya alat laboratorium/praktek, media pembelajaran, dan lain-lain yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan proses pembelajaran. Dalam hal ini juga termasuk konsep dan pengadaan alat-alat komunikasi dan seperangkat komputer dan internet.

2. Belum Optimalnya Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan di Indonesia jauh tertinggal oleh negara-negara lain yang disebabkan antara lain kinerja dan kemampuan serta kompetensi Sumber Daya Manusia Akademisi, seperti: pimpinan, staf, dosen dan karyawan masih banyak yang belum memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan posisi dan jabatan yang diemban. Peran para dosen di Perguruan Tinggi sangat penting bagi kemajuan institusinya. Oleh karena itu pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai unsur dominan dalam proses pembelajaran diarahkan untuk dapat meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme.

3. Belum Tertata dengan Baik Manajemen Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus melakukan pembenahan internal dan menata kembali pengelolaan organisasinya melalui perubahan paradigma, strategi, tata kelola, sistem dan prosedur, sampai kepada budaya organisasi, kompetensi dan gaya kerja pimpinan, struktural, dosen dan karyawannya. Mengingat kompleksitas masalah yang harus dibenahi, maka membenahi dan menata ulang pengelolaan perguruan tinggi tidak mudah. Namun pembenahan ini harus dilakukan mengingat tantangan saat ini dan masa depan semakin berat dan kompleks. Oleh karena itu perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan inovasi manajemen kelembagaan (institusi) pendidikan secara sistemik, total, dan mendasar dengan sasaran utamanya adalah perubahan orientasi, pandangan (visi), cara berpikir, dan pola perilaku nyata (action) sebagai manifestasi adanya perubahan orientasi bisa menjadi buruh atau karyawan, persentase lulusan perguruan tinggi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri belum optimal.

Penyebab Rendahnya Kualitas Lulusan Secara umum yang menjadi penyebab rendahnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Masukan (input) seperti, kurikulum perkuliahan yang berlaku di program Strata Satu (S1) kurang mengarah pada usaha mempersiapkan mahasiswa dapat terjun langsung ke masyarakat luas, dunia usaha maupun dunia industri. Banyak materi perkuliahan hanya berorientasi pada pengkajian dan pemahaman teori-teori yang kurang diimbangi dengan logika praktis yang terjadi di lapangan. Buku referensi yang digunakan oleh dosen kurang memberikan arahan kepada mahasiswa dalam menghadapi kondisi yang terjadi di dunia nyata. Bahkan mata kuliah yang bersifat praktis pun disampaikan secara teoretis sehingga tercipta suasana belajar yang kurang kondusif,

ditambah kurangnya kelengkapan sarana-prasarana pembelajaran, serta minimnya pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan. b. Proses penyelenggaraan perguruan tinggi; masih terdapat perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti: memadatkan waktu belajar, mengurangi frekuensi pertemuan/tatap muka. Dengan demikian agar lulusan (output) lembaga pendidikan tinggi dapat meluluskan peserta didik yang siap pakai di dunia usaha maupun dunia industri dan masyarakat, maka salah satu alternatif yang harus ditempuh adalah: a. Perguruan tinggi harus mempunyai sistem pendidikan dan pengajaran yang up to date, yang berarti pendidikan di perguruan tinggi, baik dari kurikulum, mata kuliah hingga cara belajar harus menyesuaikan dengan kondisi riil yang sedang berkembang di masyarakat.

b. Kurikulum program studi harus berbasis kompetensi dan silabus dari kurikulum tersebut harus terus dikajimaterinya agar mempunyai cakupan dan batas-batas yang jelas (wilayah epistemologi), relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan dinamis sesuai dengan dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang yang bersangkutan. Dengan materi yang jelas batas-batasnya dimaksudkan agar suatu mata kuliah atau bidang studi atau suatu program studi jelas perbedaannya dengan mata kuliah atau program studi lain, tidak tumpang tindih (overlapping) dan rancu. Persamaan dan perbedaan antar berbagai mata kuliah dan program studi tentu dapat diidentifikasi, tetapi arah masing-masing tetap jelas kegunaannya bagi pengembangan masyarakat, yang merupakan tantangan karena memerlukan sinergi antara mahasiswa dan dosen yang kreatif dan kritis. c. Proses pembelajaran yang terkendali, berarti dosen mampu menyediakan sumber pembelajaran dan mampu menjaga proses penyampaian secara konsisten sehingga mampu memenuhi kepuasan dan kebutuhan mahasiswa yang ada. Standar lulusan (output) dan keterpakaian lulusan (outcome) di masyarakat yang terjamin, berarti lulusan (output) dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan tenaga kerja terampil dan siap melaksanakan pekerjaan di lapangan.

46

### 3. Efektivitas Pengelolaan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2022). Standar Pengelolaan Program Pendidikan Nonformal Dari Perspektif Akreditasi. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(1), 42-49. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i1.2403>
- Arifudin, O. (2019). MANAJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169, <https://doi.org/10.31955/mea.v3i1.274>
- Daud, Y. M. (2022). Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia. *Intelektualita*, 10(02).
- Debrian, (2023). *Konsep Iceberg Model Dalam Memahami Root-Causes Suatu Kejadian, Case : Kasus Korupsi*, diakses melalui <https://www.debrianruhut.web.id/creating-value-added/gagasan/konsep-iceberg-model-dalam-memahami-root-causes-suatu-kejadian-case-kasus->

---

<sup>46</sup> Yuliawati, S. (2012). Kajian implementasi tri dharma perguruan tinggi sebagai fenomena pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya*, 218712.

[korupsi/](#). Tanggal 18 Agustus 2023, pukul 13.45 WIB.

- Fadila, R. N., Lutfiani, E. A., Ramadiani, I. S., Veronika, N., Rachmanto, D., & Arfinanti, N. (2020). Efektivitas pengelolaan sumber daya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 81-88. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.28997>
- H Abuddin Nata, M. A. (2012). *Pengaturan Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Khairiah, K., Mubaraq, Z., Mareta, M., Musa, D. T., Naimah, N., & Sulistyorini. (2023). Discrimination in Online Learning During the COVID-19 Pandemic in Indonesian Higher Education. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), e710. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.710>
- Khairiah, K., Mubaraq, Z., Asmendri, A., Hendriani, S., Musa, D. T. & Sihombing, A. A. (2022). Delegitimization of leadership in overcoming difficulties in online learning during the COVID-19 pandemic. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*. 14(3), 726-739. <https://doi.org/10.18844/wjet.v14i3.7209>
- Khairiah, K., & Sirajuddin, S. (2019). The Effects of University Leadership Management: Efforts to Improve the Education Quality of State Institute for Islamic Studies (IAIN) of Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 239–266. <https://doi.org/10.14421/jpi.2018.72.239-266>
- Khairiah, K. (2015). Pengaruh Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan PTAIN. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 8(2).
- Lexi J, Moloeng, (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004),
- Marselinus Heriteluna, (2017), *Akreditasi Perguruan Tinggi dan Budaya Bukti (Culture of Evidence)*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya. Jurnal SEPAKAT Vol.4 No.1, Desember 2017. Baca Juga: Qausya Faviandhani dan Dwi Ayus Lusya, (2018), *Analisis Sentiment Mahasiswa Manajemen Tahun Pertama Terhadap Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Swasta*. Universitas Narotama Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen Magistra Vol.2.No.2 September 2018. <https://www.example.edu/paper.pdf>
- Maisah, Hairul Fauzi, dkk, (2020). *Strategi Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi*, Kantor : Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, Volume 1, Issue 5, Mei 2020. <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i5.202>
- Muhammad Rashif Anshari, *Fungsi Penilaian Instrumen Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi Baru*. Politeknik Unggulan Kalimantan Kota Banjarmasin, Jurnal Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2 bulan Juli 2021. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.3127>
- Prasetyo, M. A. M., & Husaini, H. (2021). Efektivitas Pengelolaan Mutu Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. *Improvement: Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 8(1), 29-39. <https://doi.org/10.21009/improvement.v8i1.19308>
- Qausya Faviandhani dan Dwi Ayus Lusya, *Analisis Sentiment Mahasiswa Manajemen*

*Tahun Pertama Terhadap Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Swasta.* Universitas Narotama Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen Magistra Vol.2.No.2 September 2018.

- Razak, Y., Syah, D., & Aziz, A. (2016). Kepemimpinan, kinerja dosen dalam peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi. *Tanzhim*, 1(02), 30-44.
- Rohman, M., & Amri, S. (2012). Pengaturan Pendidikan Analisis dan solusi terhadap kinerja pengaturan kelas dan strategi pengajaran yang efektif. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Sucipto, S. (2021). Pendampingan Manajemen Pengelolaan Jurnal Ilmiah untuk Persiapan Akreditasi Jurnal Nasional di Universitas Tulungagung. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 62-69. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.28>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Umam, M. K. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik. *Jurnal Al-Hikmah*, 6(2), 62-76.
- Wajdi, M. B. N. (2016). Metamorfosa Perguruan Tinggi Agama Islam. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 4(1), 92-109. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahtdzib/article/view/2227>
- Wijiharjono, N. (2021). Akreditasi Perguruan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Sebuah Pengalaman dan Harapan. <https://orcid.org/0000-0003-0089-7586>